

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan data penelitian,

kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel suku bunga secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suku bunga akan menurunkan investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebaliknya suku bunga yang rendah cenderung mendorong peningkatan investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan UMK tanpa diikuti dengan produktivitas yang efisien maka akan menurunkan investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Variabel jumlah kunjungan wisatawan secara statistik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2023. Hal ini

menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan dapat memberikan tekanan pada infrastruktur lokal dan meningkatkan biaya hidup, yang berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Lonjakan wisatawan dapat meningkatkan biaya operasional bagi investor, terutama di bidang-bidang usaha yang sangat mengandalkan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Dengan demikian, meskipun sektor pariwisata berkembang, namun tingginya jumlah kunjungan wisatawan bisa menghambat investasi akibat meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur dan biaya operasional.

4. Variabel jumlah penduduk secara statistik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap investasi di lima kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2023. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk tidak akan mempengaruhi investasi di lima Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Implikasi

1. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perlu memperhatikan dampak kenaikan suku bunga terhadap sektor riil terutama investasi, karena perubahan suku bunga secara langsung memengaruhi biaya modal bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, kestabilan suku bunga dan kecenderungan kebijakan yang mendukung dunia usaha menjadi faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat. Di sisi lain, peran pemerintah daerah

juga sangat penting terutama dalam memberikan dukungan nyata seperti insentif atau kemudahan akses pembiayaan bagi sektor-sektor prioritas. Kolaborasi antara kebijakan moneter yang tepat dan dukungan fiskal di tingkat daerah menjadi hal yang perlu untuk mendorong produktivitas dan memperkuat dasar investasi di sektor riil.

2. Pemerintah daerah perlu lebih berhati-hati dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), supaya tidak menimbulkan beban berlebih bagi pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja. Penyesuaian UMK sebaiknya disertai dengan strategi peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta penyediaan infrastruktur penunjang yang memadai. Selain itu, perlu adanya sinergi antara kebijakan ketenagakerjaan dan kebijakan investasi, agar peningkatan kesejahteraan pekerja tidak mengorbankan daya saing ekonomi. Dalam jangka Panjang, kebijakan yang menyeimbangkan antara upah dan produktivitas akan menciptakan iklim usaha yang lebih stabil dan menarik bagi investor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Pemerintah daerah dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata perlu membuat kebijakan yang tidak hanya

fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga memperkuat fasilitas umum supaya bisa menampung lonjakan wisatawan tanpa menimbulkan tekanan berlebih. Selain itu, penting juga untuk mengendalikan dampak sosial ekonomi, seperti naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari dan biaya hidup, supaya investasi di berbagai sektor tetap menarik. Langkah yang tepat akan membantu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelangsungan ekonomi lokal, sehingga investasi dapat terus berkembang secara optimal.

4. Pemerintah daerah sebaiknya fokus meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki Pendidikan, memberikan pelatihan kerja, dan mengajarkan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia industry. Selain itu, Pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, transportasi, internet, dan fasilitas umum lainnya juga perlu diprioritaskan karena hal-hal ini sangat memengaruhi kelancaran usaha. Dengan begitu penduduk yang banyak bisa menjadi asset yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi, asalkan mereka punya kerempilan dan sarana yang mendukung. Jika kualitas dan efisiensi meningkat, maka DIY akan lebih menarik bagi investor.
5. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang lebih menyeluruh untuk mengelola jumlah dan kualitas penduduk, terutama karena DIY memiliki Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) yang cukup tinggi. Artinya, masyarakat di wilayah ini sudah memiliki Pendidikan, Kesehatan, dan taraf hidup yang baik. Namun, kondisi tersebut belum secara langsung mendorong peningkatan investasi. Maka dari itu, kebijakan yang dibuat tidak hanya cukup fokus pada Pembangunan manusia saja, tapi juga harus bisa memanfaatkan potensi penduduk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Contohnya, dengan menyediakan lapangan kerja sesuai keahlian, memperkuat usaha lokal, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik, maka ekonomi akan menjadi lebih stabil dan menarik bagi investor. Lingkungan yang stabil dan produktif inilah yang dibutuhkan untuk menciptakan investasi yang tumbuh secara berkelanjutan di Yogyakarta.

C. Keterbatasan penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasilnya belum tentu bisa langsung diterapkan di daerah lain yang memiliki kondisi geografis dan ekonomi yang berbeda.
2. Beberapa data penting yang dibutuhkan untuk analisis, seperti Suku bunga, UMK, jumlah penduduk, dan jumlah kunjungan wisatawan, tidak tersedia secara lengkap, atau diperbaharui secara berkala. Hal ini membuat proses pengumpulan data menjadi lebih lambat dan membatasi cakupan analisis yang bisa digunakan.